

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**



TAHUN 2016 – 2021

Kata Pengantar

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 – 2021 yang memuat visi, misi dan program pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Renstra disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pegangan dalam rangka melaksanakan Pembangunan Pertanian dalam menentukan langkah kebijakan dan melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran program yang dapat berjalan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Humbang Hasundutan dan yang didukung oleh Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan.

Atas kerjasama semua pihak, akhirnya Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 – 2021 dapat disusun, dan merupakan pedoman dan acuan bagi pelaksanaan pembangunan Pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan

Doloksanggul, Juli 2018

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**



**Ir. JUNTER MARBUN, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19810918 200804 2 001**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, saat ini memasuki periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-3 (2015-2020) setelah RPJMN ke-2 (2009-2014) berakhir. Pada RPJMN tahap ke-3 (2015-2020), difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pentahapan RPJPN 2005-2025.

Pada RPJMN tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam menyediakan bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya mencapai target sukses pembangunan pertanian pada RPJMN tahap-2 (2014-2015) yang meliputi (1) peningkatan swasembada berkelanjutan padi dan jagung dan swasembada kedelai, gula dan daging sapi, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani melalui strategis yang dikemas dalam 7 Gema Revitalisasi yang meliputi (1) revitalisasi lahan, (2) revitalisasi perbenihan dan perbibitan, (3) revitalisasi infrastruktur pertanian, (4) revitalisasi SDM petani, (5) revitalisasi permodalan petani, (6) revitalisasi kelembagaan petani, dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir. Sampai saat ini telah banyak capaian yang diwujudkan meskipun masih perlu di tingkatkan.

Pembangunan sektor pertanian dalam 5 (lima) tahun kedepan akan mengacu kepada paradigma pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, institusional dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multi fungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyediaan sarana wisata (*agrowisata*).

Sesuai dengan Nawa Cita, Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan memprioritaskan arah pembangunan pada sektor pertanian untuk mendukung mewujudkan kedaulatan pangan agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat.

Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu daerah sasaran pengembangan kawasan pertanian di Indonesia, karena dari jumlah penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 (*Publikasi BPS Tahun 2016*) sebesar 182.991 jiwa, 85% diantaranya adalah hidup dari sektor pertanian. Dari sisi pertumbuhan ekonomi Humbang Hasundutan selama 3 (tiga) tahun terakhir bahwa sektor pertanian menjadi penyumbang kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu secara berturut-turut adalah tahun 2013 sebesar 47,78%, tahun 2014 sebesar 46,58% dan Tahun 2015 sebesar 45,78%. Selanjutnya pada tahun 2015 ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan tumbuh sebesar 5,24% dari besaran pertumbuhan ekonomi tersebut bahwa pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sebesar 3,97%.

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Humbang Hasundutan, sasaran pembangunan daerah diprioritaskan kepada sektor pertanian. Sejalan dengan dengan itu pemerintah daerah Kabupaten Humbang Hasundutan lima tahun kedepan mengembangkan kawasan pertanian sebagai salah satu sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan pengembangan kawasan peternakan.

1.2. Landasan Hukum

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Provinsi dan juga di tingkat Nasional. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut pedoman hukum yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

- A. Landasan Idiil adalah Pancasila
- B. Landasan Konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945
- C. Landasan operasional adalah sebagai berikut :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 157);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2012 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman resmi bagi SKPD Dinas Pertanian dalam menyusun rencana kerja dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan Pertanian di kabupaten Humbang Hasundutan selama lima tahun. Renstra SKPD menjadi acuan bagi Dinas Pertanian daerah untuk menyusun kegiatan-kegiatan tahunan yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Berdasar pertimbangan tersebut maka penyusunan renstra SKPD Dinas Pertanian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan acuan resmi bagi Dinas Pertanian Humbang Hasundutan berserta pihak terkait untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang berkenaan dengan Dinas Pertanian di daerah kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Menyediakan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dievaluasi dengan hasil yang maksimal.
3. Memberikan gambaran pertanian secara umum sehingga didapat pemahaman yang komprehensif dan searah dengan arah pembangunan mulai tingkat nasional, provinsi dan daerah.
4. Membantu SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan dan jaringannya untuk memahami dan menilai pelaksanaan kegiatan operasional yang berlangsung selama lima tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan disusun dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri atas:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan OPD, yang terdiri dari

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Permasalahan
- 3.2 Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan maka Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai tugas dalam melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pengembangan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Berdasarkan tugas pokok tersebut maka Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas** Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. **Sekretariat** tugas pokok menyusun rencana dan program kegiatan, tata usaha umum dan kepegawaian, keuangan dan asset. Secretariat membawahi :
 - a). Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b). Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - c). Sub bagian Keuangan dan Aset
3. **Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura** mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura yang meliputi perbenihan, pengolahan dan pemasaran, pendataan, pencegahan dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman. Bidang tanaman pangan dan hortikultura membawahi :
 - a) Seksi Produksi;
 - b) Seksi Perbenihan dan Perlindungan
 - c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran
4. **Bidang Perkebunan** mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pengembangan perkebunan meliputi meliputi perbenihan, pengolahan dan

pemasaran, pendataan, pencegahan dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman. Bidang perkebunan membawahi :

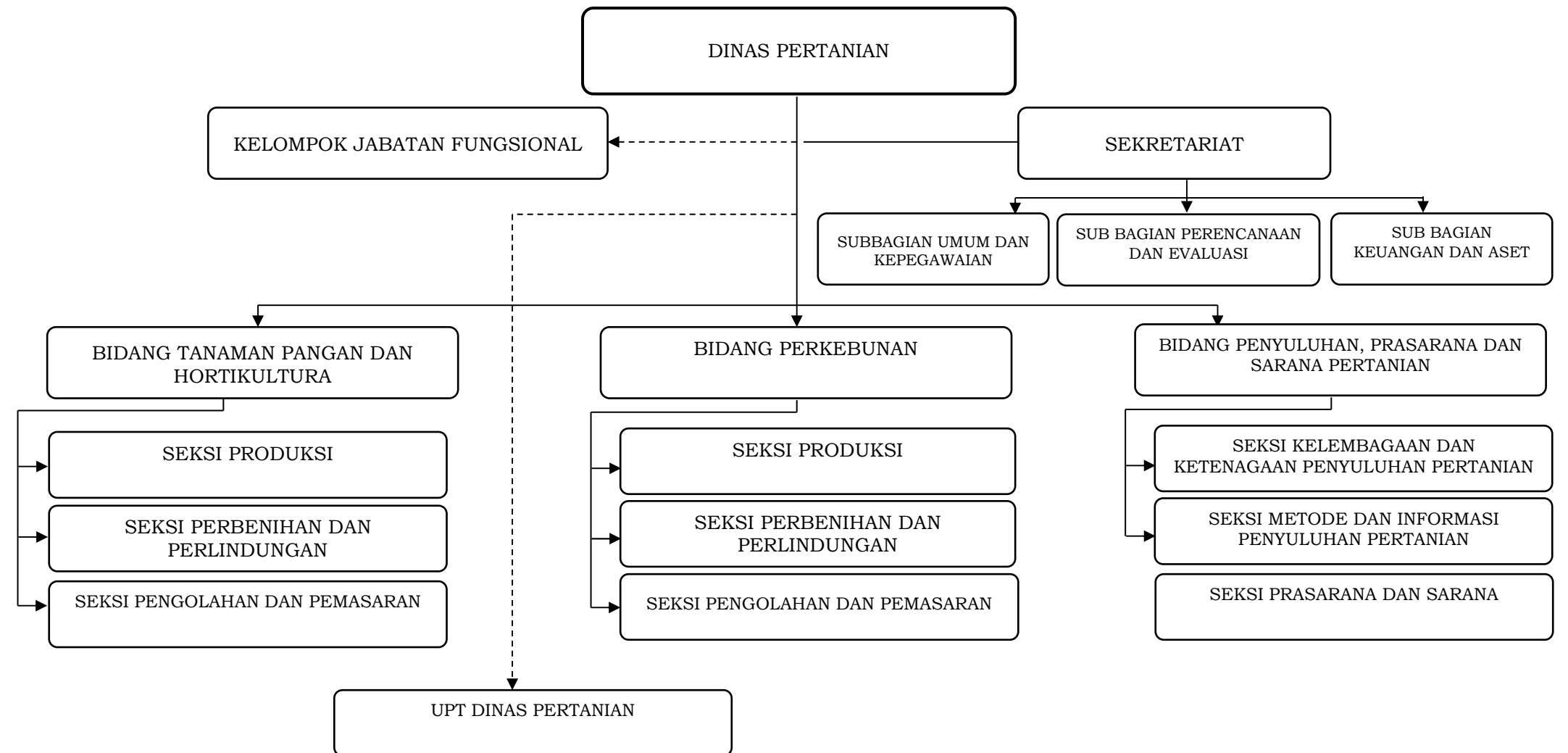
- a) Seksi Produksi;
- b) Seksi Perbenihan dan Perlindungan
- c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran

5. **Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian** mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pengembangan melalui kegiatan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan serta penyediaan prasana dan sarana pertanian. Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian membawahi :

- a) Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Pertanian
- b) Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian
- c) Seksi Prasarana dan Sarana

Struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 sebagai berikut :

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN.



2.2. Sumber Daya SKPD

Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumberdaya yang dimiliki seperti dalam tabel berikut :

2.2.1. Sumber Daya Manusia/Sumber Daya Aparatur

Tabel 1. Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	S-2	S-1	Diploma	SMA	SMP	SD	Jml
1	Kepala Dinas	1	0	0	0	0	0	1
2	Sekretaris	0	1	0	0	0	0	1
3	Kepala Bidang	1	2	0	0	0	0	3
4	Kasubbag	0	3	0	0	0	0	3
5	Kepala Seksi	0	9	0	0	0	0	9
6	Staf Administrasi	0	2	2	3	1	0	8
7	Penyuluh Pertanian Lapangan	0	7	3	20	0	0	30

Tabel 2. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Latihan Perjenjangan, Teknis dan Fungsional

No.	Jenis Diklat	Jumlah (Orang)
1	Spamen/Diklatpim II	-
2	Spama/Diklatpim III	4
3	Spada/Adum/Diklatpim IV	10
4	Diklat Teknis Substantif	-
5	Diklat Fungsional	14

2.2.2. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan juga didukung dengan sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain Gedung Kantor, Perlengkapan Gedung Kantor, dan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 serta Alat – Alat Berat dengan nilai asset masing – masing sebesar :

Tabel. 3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Barang/Aset	Jumlah (Rp)
1	Tanah	12.148.390.990
2	Bangunan/Gedung	1.099.765.202,24
3	Mesin (Mobil, Sepeda Motor dan Alsintan)	10.613.176.333,99
4	Jaringan Irigasi (Dam Parit, Embung)	33.090.295.423,93
5	Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi)	17.227.335.950,85

2.2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2015 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun – tahun sebelumnya. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2015 mencapai 5,24 persen, sedangkan tahun 2014 sebesar 5,32 persen. Hal ini disebabkan mayoritas lapangan usaha mengalami perlambatan pertumbuhan, yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha pertambangan dan penggalian, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran & reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha penyedia akomodasi dan makanan minuman, lapangan usaha real estat, lapangan usaha jasa pendidikan dan lapangan usaha kesehatan dan kegiatan social

Tabel 4. Data PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013 s/d 2015 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan usaha (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.432,77	1.570,01	1.749,55	1.892,63	2051,96
Pertambangan dan Penggalian	16,76	19,15	22,2	24,18	26,89
Industri Pengolahan	48,95	54,03	57,96	65,88	74,74
Pengadaan Listrik dan Gas	2.48	2.61	2.66	2.81	2.83
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.95	2.19	2.41	2.72	3.04
Konstruksi	369.09	415.47	472.64	545.95	620.07
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	394.15	444.50	499.07	562.13	629.80
Pergudangan	66,83	73,26	87,65	100,56	115,59
Penyediaan Akomodasi dan Makan/minum	84,64	98,09	115,33	133,18	150,7
Informasi dan Komunikasi	29,93	31,7	33,81	36,08	39,64

Jasa Keuangan dan Asuransi	34,31	39,59	43,36	49,55	55,07
Real Estate	71,62	77,13	91,64	105,52	114,11
Jasa Perusahaan	3,58	4,09	4,7	5,32	5,9
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial	330,28	378,19	416,08	466,34	513,12
Jasa Pendidikan	29,33	32,12	35,55	39,08	42,98
Jasa Kesehatan dan Kegiatan	17,58	19,77	22,18	25,36	29,26
Jasa Lainnya	3,95	4,3	4,9	5,63	6,22
Produk Domestik Regonal Bruto	2 938,20	3267,01	3661,72	4 062,92	4 481,92

Tabel 5. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha

Lapangan usaha	2011	2012	2013	2014	2015
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1,5	4,22	5,04	3,24	3,97
Pertambangan dan Penggalian	7,47	7,53	8,45	8,17	7,44
Pengadaan Listrik dan Gas	8,3	8,27	5,37	11,34	5,71
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,67	5,14	5,58	6,02	6,07
Konstruksi	7,55	6,47	6,73	7,26	6,59
Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,87	8,54	7,4	7,1	5,5
Transportasi dan Pergudangan	7,77	7,83	8,13	8,1	7,52

2.2.4. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya

1). Padi

Luas tanam, luas panen, produktivitas, produksi serta kebutuhan beras untuk memantapkan swasembada beras di Kabupaten Humbang Hasundutan

Tabel 6

Tabel Luas tanam, Luas Panen, Produktivitas, Produksi serta Kebutuhan Beras Kabupaten Humbang Hasundutan

No	URAIAN	Tahun				Pencapaian Target (%) Tahun 2015
		Target 2014	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	195.105	195.105	195.105	195.105	100
2.	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	150	150	150	150	100
3.	Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	28.000	29.265,75	28.000	29.265,75	104,5

4.	Ketersediaan Beras untuk dikonsumsi*)	28.000	29.265,75	28.000	29.265,75	104,5
5.	Surplus/Penyanga a per Tahun (Ton) (4-3)	23.000	23.397,2	25.000	26.638.75	101
6.	Produksi GKG (ton)	82.070	89.217.69	84.700	88.148	104.07
7.	Luas Panen (Ha)	19.010	18.767	19.208	18.409	95.84
8.	Produktivitas GKP (Kw/Ha)	50.17	55.24	51.23	55.64	108.61
9.	Luas Tanam (Ha)	19.780	17.953	20.265	19.057	94.04

2) Jagung

Tabel 7

Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, Produksi serta Kebutuhan Jagung Untuk Memantapkan Swasembada Jagung Di Kabupaten Humbang Hasundutan

N o.	URAIAN	Tahun				Pencapaian Target (%) Tahun 2015
		Target 2014	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	195.105	195.105	195.105	195.105	100
2.	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	6.75	6.73	6.73	6.73	100
3.	Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton)	1.155	1.330	1.330	1.898	175
4.	Surplus/Penyanga per Tahun (Ton)	924	(373)	525	585	140
5.	Produksi Jagung (Ton)	5.921.1	1.359.79	3.071	2.516	81.93
6.	Luas Panen (Ha)	1.307	401	675	523	77.49
7.	Produktivitas (Kw/Ha)	45.30	33.91	45.50	48.11	108.74
8.	Luas Tanam (Ha)	1.426	408	525	767	146.10

3). Tanaman Perkebunan

Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang mengalami pertumbuhan paling konsisten, baik ditinjau dari areal maupun produksi. Dengan pertumbuhan yang cukup konsisten, subsektor perkebunan mempunyai peran strategis, baik dalam pembangunan ekonomi secara nasional maupun dalam menjawab isu-isu global. Subsektor perkebunan berperan dalam penyediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, sumber devisa, pengentasan kemiskinan, dan konservasi lingkungan.

Beberapa produk perkebunan Kabupaten Humbang Hasundutan seperti karet, kopi, tembakau, kelapa sawit dan kakao, diakui memiliki keunggulan komparatif di pasar internasional sehingga peluang produk dalam negeri untuk masuk ke pasar internasional terbuka cukup lebar. Tanaman perkebunan di Kabupaten Humbang Hasundutan diusahakan dalam bentuk perkebunan rakyat dengan skala usaha kecil. Gambaran Luas areal dan produksi perkebunan tahun 2013 s.d 2015 di Kabupaten Humbang Hasundutan, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 8

Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Humbang Hasundutan menurut jenis komoditi

No	Jenis Komoditi	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)
1	Kopi	11.283,30	6.118,81	11.316,80	6143,50	11.350,75	6.161,90
2	Karet	4.242,20	2.139,70	4.284,12	2.171,40	4.290,50	2.177,50
3	Kakao	1.608,10	454,34	1.599,80	465,30	1.604,45	466,70
4	Kelapa	318,50	156,40	317,40	157,10	318,35	157,57
5	Kelapa Sawit	345,50	346,40	345,50	346,40	346,50	347,40
6	Kemenyan	4.884,00	859,31	4.884,00	859,31	4.884,00	859,31
7	Aren	223,95	123,36	-	-	-	-
8	Tembakau	291,00	153,05	285,00	153,90	285,80	154,36
9	Nilam	18,80	2,22	-	-	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan peluang pembangunan pertanian tidak dapat lepas dari kondisi internal dan eksternal baik level kabupaten/kota, provinsi, nasional maupun internasional. Dalam konteks pembangunan daerah yang menganut era keterbukaan, kinerja makro ekonomi nasional dan daerah cukup rentan dengan gejolak eksternal. Namun efek dari gejolak eksternal tersebut terhadap pertanian Humbang Hasundutan tergantung pada karakteristik pertanian Humbang Hasundutan dan kekuatan internal. Tantangan utama pembangunan pertanian Humbang Hasundutan ke depan adalah Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi. Meluasnya areal yang potensial terkena gangguan bencana alam kekeringan/kebanjiran. Mahalnya agroinput (sarana produksi dan alat mesin pertanian). Menurunnya minat generasi muda terhadap usaha tani, Kemampuan permodalan petani terbatas, Impor benih hortikultura terus meningkat, Penerapan teknologi pertanian terbatas. Insentif peningkatan mutu masih rendah. Daya saing produk hortikultura masih rendah. Hama dan penyakit tanaman (Organisme Pengganggu Tumbuhan) makin berkembang. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi. Peluang pembangunan

pertanian Humbang Hasundutan dalam menciptakan pembangunan pertanian adalah : Sektor pertanian merupakan program unggulan. Permintaan pasar akan produk-produk pertanian. Pemanfaatan potensi SDA, SDM dalam pengembangan agribisnis. Komoditas spesifik di sentra produksi cukup banyak. Pengembangan infrastruktur, sarana-prasarana di pedesaan masih bisa ditingkatkan. Teknologi komunikasi dan informasi mendukung pengembangan agribisnis di pedesaan. Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura terbuka luas. Kesadaran petani dalam penggunaan sarana produksi pertanian.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Perencanaan pembangunan merupakan suatu sistem yang berkelanjutan, keberhasilan dan kegagalan periode sebelumnya menentukan penyusunan rencana pembangunan untuk tahun – tahun selanjutnya. Untuk menghasilkan perencanaan yang lebih baik maka berbagai kendala dan permasalahannya yang telah dialami pada pelaksanaan perencanaan kegiatan periode sebelumnya perlu diidentifikasi sebaik mungkin.

Identifikasi permasalahan dilakukan dengan mengevaluasi dan memperhatikan capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan diuraikan sebagai berikut :

1. Keterbatasan dalam pencetakan lahan baru

Luas lahan sawah di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah 13. 620 Ha dan hingga saat ini luas sawah ini tidak mengalami penambahan karena Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan sampai dengan sekarang belum pernah menganggarkan kegiatan pencetakan sawah baru yang disebabkan karena keterbatasan anggaran. Selain itu, sangat tergantung dengan koordinasi dengan dinas terkait (PUPR) dalam penyediaan irigasinya dan juga adanya persoalan yang dihadapi dalam merealisasikan, terutama masalah status penguasaan dan kepemilikan lahan

2. Penurunan Kualitas Lahan

Sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami penurunan kualitas, bahkan banyak yang termasuk kategori kritis. Hal ini akibat pemakaian bahan kimia anorganik berlebihan. Pemakaian pupuk kimia anorganik berlebihan menyebabkan struktur tanah menjadi padat dan daya dukung tanah bagi pertumbuhan tanaman menurun. Disamping itu, produk – produk kimiawi tersebut, selain mengandung bahan yang diperlukan tanaman, dapat juga mengandung bahan kimiawi yang berbahaya (seperti senyawa klorin dan merkuri) bagi makhluk hidup.

3. Rata – rata kepemilikan lahan yang sempit

Luas penguasaan lahan petani semakin sempit sehingga menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Pada tahun 2012, luas penguasaan lahan per petani yaitu 0,22 hektar dan diperkirakan akan menjadi 0,18 hektar pada tahun 2050. Hal ini menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani, penyempitan penguasaan lahan mengakibatkan tidak efisien dalam berusahatani.

4. Sumberdaya Manusia

Pada saat ini personil yang tersedia pada Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan masih minim sehingga beberapa tugas atau pekerjaan harus dijabat secara rangkap. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja pelayanan yang ditargetkan karena tidak bisa dilakukan secara optimal. Bahkan secara umum pada setiap jabatan pada Dinas Pertanian tidak memiliki staf terutama di level eselon 4 demikian juga Penyuluh Pertanian yang tersedia khususnya Penyuluh Pertanian Swadaya masih kurang memberikan dampak terhadap pembangunan pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan, hal ini disebabkan karena disiplin ilmu mereka bukanlah pertanian dan adanya dualisme kepemimpinan yakni Kepala Desa dan Dinas Pertanian sehingga kinerja mereka kurang maksimal.

5. Alokasi anggaran Dinas Pertanian masih kecil berkisar 1 – 2% dari total APBD tahun berjalan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah : “**MEWUJUDKAN HUMBANG HASUNDUTAN YANG HEBAT DAN BERMENTALITAS UNGGUL**”.

Dari visi ini dijabarkan dalam beberapa misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha esa
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
4. Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan.
5. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Misi

Berdasarkan lima misi diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan mendukung dan melaksanakan misi 4 yaitu Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan. Selanjtnya telaahan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dengan visi dan misi Kepala Daerah dapat dijelaskan pada table 3.1

Tabel 3.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih

VISI : Mewujudkan Humbang Hasundutan yang Hebat dan Bermentalitas Unggul				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya Produktivitas hasil pertanian/perkebunan 2. Masih rendahnnya pendapatan petani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kemampuan ekonomi petani 2. Belum optimalnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan 3. Terbatasnya anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi aparatur/petani 4. Tingginya fluktuasi harga komoditi pertanian khususnya komoditi tanaman hortikultura 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Dinas Pertanian 2. Dukungan anggaran dan kebijakan Pemerintah 3. Perkembangan ilmu dan teknologi 4. Rencana Pembentukan UPT Alsintan 5. Pembangunan Balai Penyuluh pertanian (BPP)

5.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

Dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016 – 2021 maka mempedomani rencana pembangunan pertanian pada Kementerian Pertanian dan pada dinas ditingkat provinsi karenasalah satu yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan adalah adanya seinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu maka dalam penyusunan rencana strategis ini perlu dilakukan penelaahan terhadap rencana strategis dari kementerian atau lembaga terkait ditingkat pusat dan provinsi. Telaahan resntra kementerian dan lembaga dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Np e b	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1e 1 3 3 P	Pencapaian swasembada beras, jagung dan kedelai	- Ketersediaan sarana dan prasarana produksi	Masih rendahnya kemampuan petani dalam menyediakan sarana dan prasaran pertanian	Adanya ketersediaan dana APBD dan APBN
2e r m a s a l a	Peningkatan Nilai tambah, daya saing dan ekspor	- Lemahnya posisi tawar petani - Kurangnya promosi ke luar daerah	Belum adanya peraturan perundang – undangan tentang harga	- Rencana Pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda)
3h a n P e l a y a n a	Peningkatan Kesejahteraan Petani	- Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)	- Masih rendahnya kualitas produksi - Masih rendahnya SDM Petani	Adanya ketersediaan dana APBD dan APBN

n OPD berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Menurunnya kesuburan tanah (lahan pertanian) - Keterbatasan akses petani terhadap	- Menurunnya kesuburan lahan pertanian - Menurunnya minat generasi muda	- Komitmen dari Pimpinan dan jajarannya dalam peningkatan produksi dan

		permodalan	terhadap sector pertanian	produktivitas - Fasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana produksi
2	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian serta Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya SDM Petani - Rendahnya Mutu Produksi Pertanian - Terbatasnya Akses Petani terhadap Permodalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya SDM Petani dalam implementasi teknologi pertanian - Lemahnya kemampuan petani dalam pengembalian kredit pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Pembentukan Perusahaan Umum Daerah - Adanya Kegiatan Promosi/Pemasaran Pasar petani

5.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Pertanian memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Humbang Hasundutan karena merupakan suatu Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang tupoksinya di bidang Pertanian meliputi : pembangunan, pembinaan dan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, sehingga Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga berkaitan dengan dinas yang terkait dengan produksi bahan pangan.

5.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada, ditetapkan isu-isu strategis pembangunan pertanian Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.
2. Perbaikan infrastruktur pertanian
3. Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian.
4. Peningkatan akses permodalan petani.
5. Peningkatan akses pemasaran hasil pertanian.
6. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
7. Peningkatan kemampuan kelembagaan petani.
8. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian.
9. Pengembangan pola kemitraan dengan petani penangkar
10. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi, yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini merupakan target kualitatif yang penetapannya telah mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan.

Untuk merealisasikan misi perlu ditetapkan tujuan Dinas Pertanian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ini merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu strategis dan analisis lingkungan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, tujuan jangka menengah Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan adalah meningkatkan kesejahteraan petani.

4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran harus memenuhi kriteria “**SMART**” yaitu **Specific** (khusus), **Measureable** (terukur), **attainable** (dapat dibaca), **realistic** (nyata) dan **time bound** (tepat waktu).

Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Nilai Evaluasi SAKIP

2. **Meningkatnya Produksi Pertanian/Perkebunan**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan per ha (ton/ha)

3. **Meningkatnya Pendapatan Petani**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator melalui Nilai Tukar Petani (NTP) yaitu Indeks Harga yang diterima petani dibagi Indeks harga yang dibayar petani, dalam %.

Tabel 3.1. Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Target Kinerja pada Tahun ke -				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Peningkatan Pendapatan Petani	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Padi	127.463,73	130.013,00	132.613,26	135.265,53	137.970,84
			Jagung	6.185,99	6.309,71	6.435,91	6.564,63	6.695,92
			Ubi	22.946,74	23.405,67	23.873,78	24.351,26	24.838,29
			Cabe	6.249,85	6.374,84	6.502,34	6.632,39	6.765,03
			Bawang Merah	1.035,61	1.056,32	1.077,44	1.098,99	1.120,97
			Kentang	1.741,34	1.776,17	1.811,69	1.847,93	1.884,89
			Jeruk	1.448,50	1.477,47	1.507,02	1.537,16	1.567,91
			Kopi	6.764,97	6.900,27	7.038,27	7.179,04	7.322,62
	Tembakau	96,06	97,98	99,94	101,94	103,98		
		Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	NTP	-	110,00	110,50	111,00	111,50

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan

Pembangunan Pertanian dalam lima tahun kedepan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 dimana RPJMD ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.

Visi pembangunan dalam RPJMD 2016 – 2021 adalah **“MEWUJUDKAN HUMBANG HASUNDUTAN YANG HEBAT DAN BERMENTALITAS UNGGUL”**.

Visi ini dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi yakni :

6. Meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha esa
7. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.
8. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
9. Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan.
10. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Misi

Dari kelima misi diatas yang menjadi prioritas pembangunan pertanian adalah pada misi ke 4 (empat) yaitu meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan.

Peningkatan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) Tujuan Strategis yakni :

1. Mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan melalui pencapaian sasaran strategis peningkatan produksi bahan pangan
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan merata dari sisi produksi melalui pencapaian sasaran strategis peningkatan PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan

Untuk mewujudkan sasaran pokok peningkatan produksi bahan pangan yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan difokuskan pada peningkatan produktivitas padi dan jagung. Untuk itu strategi yang akan dilaksanakan adalah :

6. Peningkatan ketersediaan pupuk dan benih unggul
7. Pengendalian hama dan penyakit tanaman
8. Pembangunan/perbaikan jaringan irigasi
9. Pembangunan/perbaikan sumber – sumber air (embung, dam parit dan irigasi air tanah dalam/dangkal)
10. Pembangunan/perbaikan jalan pertanian (jalan usaha tani dan jalan produksi)
11. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian

Sedangkan untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan maka arah kebijakan difokuskan pada (1). Peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, (2). Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB, (3). Meningkatnya cakupan bina kelompok tani, (4). Meningkatnya Nilai Tukar Petani. Adapun strategi yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

2. Peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian
3. Peningkatan akses permodalan petani
4. Peningkatan akses pemasara hasil pertanian
5. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
6. Peningkatan kemampuan kelembagaan petani.
7. Pengembangan pola kemitraan dengan petani penangkar

4.2. Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, maka Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan menyusun dan melaksanakan tujuh strategi utama Pembangunan Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut :

1. Intensifikasi/Ekstensifikasi areal tanam
2. Peningkatan ketersediaan pupuk dan benih/bibit unggul
3. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pertanian
4. Penguatan kelembagaan petani
5. Peningkatan kapasitas SDM pertanian
6. Pengembangan dan penguatan permodalan petani
7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian

4.2.1. Intensifikasi/Ekstensifikasi Areal Tanam

Dalam rangka meningkatkan luas tambah tanam, dalam lima tahun kedepan akan dilaksanakan rencana aksi sebagai berikut :

1. Upsus Pajale (Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai). Mendukung sepenuhnya program nasional upsus pajale.
2. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) Padi Sawah. Meningkatkan IP Padi Sawah menjadi IP 2.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur yang selama ini masih terlantar

4.2.2. Peningkatan Ketersediaan Pupuk dan Benih/Bibit Unggul

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan pupuk dan benih/bibit unggul dalam lima tahun kedepan, maka upaya – upaya yang akan dilaksanakan adalah:

1. Melaksanakan pendampingan dan penyuluhan kepada kelompok tani agar mau menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi sehingga Kabupaten Humbang Hasundutan memperoleh alokasi pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan petani
2. Melaksanakan uji adaptasi ataupun demplot terhadap varietas benih/bibit unggul yang sesuai dengan kondisi alam Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga petani tidak enggan memakai bibit/benih unggul khususnya untuk komoditi padi
3. Pembentukan dan Pembinaan Penangkar Benih/Bibit

4.2.3. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur dan Sarana Pertanian

1. Perbaikan dan Pembangunan Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi), Dam Parit, Embung dan Irigasi Air Tanah Dalam/Dangkal dan Jaringan Irigasi Tersier
2. Melakukan koordinasi yang baik dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga dalam pembangunan atau perbaikan jaringan irigasi agar tepat lokasi dan kebutuhan
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan Brigade Alsintan Dinas Pertanian

4. Peningkatan sarana pertanian melalui pemberian bantuan kepada kelompok tani berupa pembuatan pupuk organik, sarana budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan saran pemasaran

4.2.4. Penguatan Kelembagaan Petani

Dalam rangka meningkatkan penguatan kelembagaan petani dala lima tahun ke depan, maka langkah – langkah yang akan diambil adalah :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelompok tani dan gabungan kelompok tani
2. Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis kepada kelompok tani untuk memperkuat kemampuan baik dari segi manajemen kelompok, kegiatan budidaya maupun dalam aspek pengolahan dan pemasaran
3. Memperkuat modal usaha bagi petani/gabungan kelompok tani melalui pemberian bantuan modal, dan memperkuat hubungan antara kelompok tani dan penyuluh pertanian lapangan

4.2.5. Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pertanian dalam lima tahun ke depan, maka langkah – langkah yang akan dilaksanakan adalah :

1. Pelatihan bagi aparatur baik PNS maupun non PNS (THL TB PP dan PPS)
2. Pelatihan bagi kelompok tani, gabungan kelompok tani, P3A, maupun pelaku usaha pertanian.

4.2.6. Pengembangan dan Penguatan Permodalan Petani

Dalam rangka meningkatkan permodalan petani dalam lima tahun ke depan akan dilakukan upaya – upaya sebagai berikut :

1. Menumbuhkan kelembagaan petani, kelompok tani dan gapoktan sebagai channelling agent lembaga keuangan formal baik perbankan maupun non perbankan untuk membiayai permodalan petani
2. Meningkatkan fungsi penyuluh sebagai fasilitator pembiayaan petani.

4.2.7. Penguatan Jaringan Pasar Produk Pertanian

Dalam rangka penguatan jaringan pasar produk pertanian maka dalam lima tahun ke depan upaya – upaya yang akan dilaksanakan adalah :

1. Mendukung terbentuknya Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan
2. Pembentukan Pasar Lelang di Kabupaten Humbang Hasundutan

(20) Pendampingan Kegiatan Integrated Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)

(21) Pengawasan Peredaran Pupuk bersubsidi

(22) Pendampingan Kegiatan DAK

(23) Fasilitasi Pembentukan Pennagkar Benih Padi

10. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

(1) Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

(2) Demplot Komoditi Unggulan

(3) Penyediaan Sarana Penunjang Balai Penyuluh Pertanian (BPP)

(4). Pengadaan Tanah untuk Balai Penyuluh Pertanian (BPP)

(5) Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian (BPP)

11. Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Pertanian

(1) Penilaian Kelas Kelompok Tani

(2) Rembuk KTNA

(3) Rembuk Tani

(4) Pekan Nasional (PENAS) KTNA

(5) Fasilitasi Kelembagaan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)

(6) Fasilitasi Kelembagaan Petani

(7) Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tanaman Pangan

(8) Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tanaman Perkebunan

(9) Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Tembakau bagi Petani

(10) Rapat Posko Pertanian

(11) Jambore Penyuluhan

(12) Pelatihan Peningkatan Mutu Kopi bagi Kelembagaan Kopi

(13) Bimtek Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS)

(14) Fasilitasi Lembaga Ekonomi Masyarakat

(15) Penyediaan Sarana Informasi Penyuluhan

BAB VII
INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 20 Tahun 2008. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Adapun indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar
Indikator Kinerja : Produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu (Ton)
2. Meningkatnya PDRB dari Sektor Pertanian
Indikator Kinerja : Persentase laju pertumbuhan PDRB dari sector pertanian
3. Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)
Indikator Kinerja : Persentase Nilai Tukar Petani

Indikator pengukuran kinerja jadi atas mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 – 2021 dan merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 9
Indikator Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan
Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Produksi Tanaman Pangan/Hortikultura dan Perkebunan						
1	Padi	124.964,44	127.463,73	130.013,00	132.613,26	135.265,53	137.970,84
2	Jagung	6.064,70	6.185,99	6.309,71	6.435,91	6.564,63	6.695,92
3	Ubi	12.454,40	22.946,74	23.405,67	23.873,78	24.351,26	24.838,29
4	Cabe	6.127	6.249,85	6.374,84	6.502,34	6.632,39	6.765,03
5	Bawang Merah	1.015,30	1.035,61	1.056,32	1.077,44	1.098,99	1.120,97

6	Kentang	1.707,20	1.741,34	1.776,17	1.811,69	1.847,93	1.884,89
7	Jeruk	1.420,10	1.448,50	1.477,47	1.507,02	1.537,16	1.567,91
8	Kopi	6.632,32	6.764,97	6.900,27	7.038,27	7.179,04	7.322,62
9	Tembakau	94,19	96,06	97,98	99,94	101,94	103,98
II	NilaiTukarPetani (NTP) (%)	-	-	110,00	110,50	111,00	111,50

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman, landasan dan referensi penyusunan rencana kerja pembangunan pertanian mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Keberhasilan perencanaan strategis ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari segala jajaran SKPD sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

Dengan ditetapkan/dirampungkan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2016-2021, seluruh jajaran Dinas Pertanian berkomitmen untuk:

1. Meningkatkan kompetensi secara institusional, bersama dan mandiri;
2. Menjadikan Renstra Dinas Pertanian tahun 2016-2021 sebagai pedoman utama penyusunan rencana kerja tahunan;
3. Senantiasa mengedakan penyesuaian terhadap materi muatan Renstra Dinas Pertanian tahun 2016-2021 sesuai kebutuhan dan perkembangan;
4. Meningkatkan kinerja internal Dinas Pertanian setiap tahun anggaran;
5. Menyusun kegiatan dan anggaran berbasis perencanaan jangka menengah;
6. Akan melaksanakan evaluasi rencana kerja setiap tahun sehingga terukur tingkat keberhasilan setiap tahun;
7. Menjadikan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2016-2021 sebagai buku pintar perencanaan internal Dinas Pertanian sampai dengan tahun 2021;

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memimpin dan melindungi Dinas Pertanian untuk melakukan karya terbaik.

Doloksanggul, Juli 2018

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**



Ir. JUNTER MARBUN, MM
PEMBINA TK.I
NIP.19670409 199302 1 001

Lampiran Bab V.1
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANNYA
TAHUN 2016 - 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD TAHUN 2016	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2021		SKPD PEMANGGUNG JAWAB
					INDIKATOR KINERJA	SATUAN		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	PAGU	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19
			URUSAN PILIHAN DINAS PERTANIAN																	
			A. UNSUR PENDUKUNG																	
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan internal	Angka Indeks Kepuasan Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	%	-	2	2.550.000,00	0	-	80	1.232.933.900,00	82	1.356.227.290,00	83	1.491.850.019,00	100	4.083.561.209,00	Dinas Pertanian
			1 Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan jasa surat - menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat - menyurat	Item	2	1	18.000.000,00	1	19.800.000,00	0	-	0	-	0	-	2	37.800.000,00	Dinas Pertanian
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya ketersediaan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	Jasa	1	19	9.000.000,00	19	9.900.000,00	1	10.890.000,00	1	11.979.000,00	1	13.176.900,00	41	54.945.900,00	Dinas Pertanian
			3 Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih Kantor	Meningkatnya kebersihan kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih Kantor yang terpenuhi	Item	19	33	50.000.000,00	33	55.000.000,00	19	60.500.000,00	19	66.550.000,00	19	73.205.000,00	123	305.255.000,00	Dinas Pertanian
			4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya ketersediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi	Item	33	8	18.000.000,00	8	19.800.000,00	33	21.780.000,00	33	23.958.000,00	33	26.353.800,00	115	109.891.800,00	Dinas Pertanian
			5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya ketersediaan cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	Item	8	2	4.590.000,00	2	5.049.000,00	8	5.553.900,00	8	6.109.290,00	8	6.720.219,00	28	28.022.409,00	Dinas Pertanian
			6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	Item	2	1	31.000.000,00	1	34.100.000,00	2	37.510.000,00	2	41.261.000,00	2	45.387.100,00	8	189.258.100,00	Dinas Pertanian
			7 Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya ketersediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman yang terpenuhi	Kebutuhan	1	90	500.000.000,00	90	700.000.000,00	3	770.000.000,00	3	847.000.000,00	3	931.700.000,00	189	3.748.700.000,00	Dinas Pertanian
			8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpenuhi	Kali	90	210	150.000.000,00	226	165.000.000,00	96	181.500.000,00	100	199.650.000,00	104	219.615.000,00	736	915.765.000,00	Dinas Pertanian
			9 Rapat - rapat koordinasi dalam daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang terpenuhi	Kali	200	0	-	5	108.000.000,00	345	118.800.000,00	350	130.680.000,00	360	143.748.000,00	1.060	501.228.000,00	Dinas Pertanian
			10 Penyediaan Jasa Non PNS	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS	Orang	0	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	0	-	0	-	0	-	2	63.000.000,00	Dinas Pertanian
			11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	Jenis	0	0	-	3	12.000.000,00	1	13.200.000,00	1	14.520.000,00	1	15.972.000,00	6	55.692.000,00	Dinas Pertanian
			12 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya kualitas laporan keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terpenuhi	Orang	0	0	-	3	12.000.000,00	3	13.200.000,00	3	14.520.000,00	3	15.972.000,00	12	55.692.000,00	Dinas Pertanian
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	%	65	70	552.410.000,00	75	1.023.650.200,00	80	668.416.100,00	85	1.335.257.710,00	90	2.068.783.481,00	400	5.648.517.491,00	Dinas Pertanian
			1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya pelayanan aparatur	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang bertambah	Unit	26	0	-	0	-	0	-	0	-	30	600.000.000,00	30	600.000.000,00	Dinas Pertanian
			2 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya ketersediaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang bertambah	Unit	1	1	330.030.000,00	57	363.033.000,00	15	399.336.300,00	15	439.269.930,00	15	483.196.923,00	103	2.014.866.153,00	Dinas Pertanian
			3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas/Operasional layak pakai	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	36	36	163.780.000,00	36	180.158.000,00	36	198.173.800,00	36	217.991.180,00	36	239.790.298,00	180	999.893.278,00	Dinas Pertanian
			4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor terpeliharaan dengan baik	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	0	1	48.000.000,00	1	52.800.000,00	1	58.080.000,00	1	63.888.000,00	1	70.276.800,00	5	293.044.800,00	Dinas Pertanian
			5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan inventaris kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Jenis	2	2	10.600.000,00	2	11.660.000,00	2	12.826.000,00	2	14.108.600,00	2	15.519.460,00	10	64.714.060,00	Dinas Pertanian
			6 Pengadaan Alat Angkut Alsintan Berat	Meningkatnya Kinerja Alat Berat	Jumlah alat angkut alsintan yang bertambah	Unit	0	0	-	1	415.999.200,00	0	-	1	600.000.000,00	1	660.000.000,00	3	1.675.999.200,00	Dinas Pertanian

			4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan kinerja	%	80	100	22.499.750,00	100	24.749.725,00	100	27.224.697,50	100	29.947.167,25	100	32.941.883,98	500	137.363.223,73	Dinas Pertanian	
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan SKPD	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jenis	8	8	22.499.750,00	8	24.749.725,00	8	27.224.697,50	8	29.947.167,25	8	32.941.883,98	40	137.363.223,73	Dinas Pertanian
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	0	0	0	60	100.000.000,00	65	110.000.000,00	70	121.000.000,00	75	133.100.000,00	270	464.100.000,00	Dinas Pertanian
			1	Pengiriman ASN Mengikuti Diklat, Workshop, Bimtek dan Studi Banding	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, workshop, bimtek dan studi banding	Orang	0	0	-	20	100.000.000,00	20	110.000.000,00	20	121.000.000,00	20	133.100.000,00	80	464.100.000,00	Dinas Pertanian
			B. PROGRAM PRIORITAS																0	-	
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Program Pengembangan Data/ Informasi Pertanian	Persentase ketersediaan data/informasi pertanian	Persentase ketersediaan data/informasi pertanian	%	0	100	191.141.950,00	100	680.256.145,00	100	523.281.759,50	100	575.609.935,45	100	633.170.929,00	100	2.603.460.718,95	Dinas Pertanian	
			1	Penyusunan Statistik Pertanian	Data Statistik Pertanian yang valid	Jumlah Komoditi Pertanian yang didata	Komoditi	59	59	117.000.000,00	59	128.700.000,00	59	141.570.000,00	59	155.727.000,00	59	171.299.700,00	295	714.296.700,00	Dinas Pertanian
			2	Penyusunan Statistik Perkebunan	Data Statistik Perkebunan yang valid	Jumlah Komoditi Perkebunan yang didata	Komoditi	1	0	-	0	-	9	50.000.000,00	9	55.000.000,00	9	60.500.000,00	27	165.500.000,00	Dinas Pertanian
			3	Penyusunan Diagram Timbang NTP Kabupaten Humbang Hasundutan	Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yang valid	NTP Kabupaten Humbang Hasundutan	Kecamatan	0	0	-	10	220.000.000,00	10	242.000.000,00	10	266.200.000,00	10	292.820.000,00	40	1.021.020.000,00	Dinas Pertanian
			4	Pengubinan Padi dan Palawija	Data Produktivitas Tanaman Pangan yang terukur	Data produktivitas tanaman pangan yang terukur	Komoditi	6	6	44.563.550,00	6	49.019.905,00	6	53.921.895,50	6	59.314.085,05	6	65.245.493,56	6	272.064.929,11	Dinas Pertanian
			5	Penyusunan Database Pertanian	Jumlah Data Base Pertanian yang tersusun	Jumlah data base pertanian yang tersusun	Database	0	0	-	4	250.000.000,00	0	-	0	-	0	-	4	250.000.000,00	Dinas Pertanian
			6	Pencacahan curah hujan harian/iklim	Data Curah Hujan Harian/iklim yang terukur	Data curah hujan harian/iklim yang terukur	bulan	12	12	29.578.400,00	12	32.536.240,00	12	35.789.864,00	12	39.368.850,40	12	43.305.735,44	12	180.579.089,84	Dinas Pertanian
				Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase peningkatan produksi pertanian/perkebunan	%	1	1	5.530.870.600,00	1,50	8.762.555.840,00	2	37.075.240.424,00	2,50	27.023.564.466,40	3	29.490.020.913,04	3	107.882.252.243,44	
			1	Pendampingan UPSUS Pajale	Terlaksananya Kegiatan UPSUS Pajale	Luas Tambah Tanam (LTT) Pajale	Ha	5000	11000	400.000.000,00	12.000	440.000.000,00	15.000	484.000.000,00	17.000	532.400.000,00	20.000	585.640.000,00	75.000	2.442.040.000,00	Dinas Pertanian
			2	Pengembangan Tanaman Pangan	Meningkatnya produksi tanaman pangan	Luas Tambah Tanam (LTT) Tanaman Pangan	Ha	20	50	500.000.000,00	50	600.000.000,00	300	1.500.000.000,00	300	1.650.000.000,00	300	1.815.000.000,00	1.000	6.065.000.000,00	Dinas Pertanian
			3	Pengembangan Tanaman Hortikultura	Meningkatnya produksi tanaman hortikultura	Luas Tambah Tanam (LTT) Tanaman Hortikultura	Ha	100	100	800.000.000,00	100	880.000.000,00	300	1.000.000.000,00	200	1.100.000.000,00	200	1.210.000.000,00	900	4.990.000.000,00	Dinas Pertanian
			4	Pengembangan Tanaman Perkebunan	Meningkatnya luas areal tanaman perkebunan	Pertambahan Luas Areal Tanaman Perkebunan	Ha	200	200	1.000.000.000,00	200	1.100.000.000,00	200	1.210.000.000,00	200	1.331.000.000,00	200	1.464.100.000,00	1.000	6.105.100.000,00	Dinas Pertanian
			5	Pembangunan Embung	Terlaksananya Pembangunan Embung	Jumlah Embung yang dibangun	Unit	24	5	1.000.000.000,00	4	1.100.000.000,00	26	9.000.000.000,00	26	9.900.000.000,00	4	10.890.000.000,00	65	31.890.000.000,00	Dinas Pertanian
			6	Pembangunan Irigasi Air Tanah	Terlaksananya Pembangunan Irigasi Air Tanah	Jumlah Irigasi Air Tanah yang dibangun	Unit	0	0	-	0	-	5	1.250.000.000,00	5	1.375.000.000,00	5	1.512.500.000,00	15	4.137.500.000,00	Dinas Pertanian
			7	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Pembangunan Jalan Usaha Tani	Panjang JUT yang dibangun	Km	15	2,5	587.660.800,00	5	1.000.000.000,00	22,5	4.400.000.000,00	10	4.840.000.000,00	10	5.324.000.000,00	50	16.151.660.800,00	Dinas Pertanian
			8	Pembangunan Jalan Pertanian (Jalan Produksi)	Terlaksananya Pembangunan Jalan Produksi	Panjang Jalan Produksi yang dibangun	Km	0	0	-	0	-	47	14.100.000.000,00	5	1.000.000.000,00	5	1.100.000.000,00	57	16.200.000.000,00	Dinas Pertanian
			9	Pembangunan Dam Parit	Terlaksananya Pembangunan Dam Parit	Jumlah Dam Parit yang dibangun	Unit	13	2	500.000.000,00	11	1.650.000.000,00	13	1.950.000.000,00	10	2.145.000.000,00	12	2.359.500.000,00	48	8.604.500.000,00	Dinas Pertanian
			10	Perencanaan Kegiatan Pembangunan Fisik	Tersedianya DED dan SID Kegiatan Pembangunan Fisik	Jumlah Data SID dan DED yang tersedia	Paket	1	1	141.414.400,00	1	155.555.840,00	1	171.111.424,00	1	188.222.566,40	1	207.044.823,04	5	863.349.053,44	Dinas Pertanian
			12	Intensifikasi Tanaman Tembakau	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Tembakau	Produktivitas tanaman tembakau	Ha	100	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	600.000.000,00	100	660.000.000,00	100	726.000.000,00	500	2.586.000.000,00	Dinas Pertanian
			13	Pengendalian Hama Terpadu	Menurunya serangan hama dan penyakit tanaman	Luas Lahan yang terkendali hama terpadu	Ha	0	0	-	0	-	44	154.328.000,00	50	169.760.800,00	50	186.736.880,00	144	510.825.680,00	Dinas Pertanian

			4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19	
			14	Pengadaan Pestisida Pertanian	Terkendalikannya serangan hama dan penyakit tanaman	Jenis pestisida yang tersedia	Jenis	0	1	101.795.400,00	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	6	1.029.995.400,00	Dinas Pertanian
			15	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Bidang Perkebunan	Meningkannya Monitoring Kegiatan TPH	Persentase kegiatan bidang perkebunan yang dimonitoring	%	0	0	-	10	60.000.000,00	30	66.000.000,00	30	72.600.000,00	30	79.860.000,00	100	278.460.000,00	Dinas Pertanian
			16	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase kegiatan bidang tanaman pangan dan hortikultura yang dimonitoring	Persentase kegiatan bidang tanaman pangan dan hortikultura yang dimonitoring	%	0	0	-	10	60.000.000,00	30	66.000.000,00	30	72.600.000,00	30	79.860.000,00	100	278.460.000,00	Dinas Pertanian
			17	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian	Meningkannya Monitoring Kegiatan Penyuluhan, Sarana dan Prasarana	Persentase kegiatan bidang penyuluhan, sarana dan prasarana yang dimonitoring	%	0	0	-	10	60.000.000,00	30	66.000.000,00	30	72.600.000,00	30	79.860.000,00	100	278.460.000,00	Dinas Pertanian
			18	Pembentukan Kebun Benih Sumber/Penangkar Kopi	Meningkatnya ketersediaan bibit kopi bersertifikat	Jumlah Kebun Benih Sumber/Penangkar Kopi yang terbentuk	Lokasi	0	0	-	0	-	4	100.000.000,00	4	110.000.000,00	4	121.000.000,00	12	331.000.000,00	Dinas Pertanian
			19	Pendampingan Pembangunan UPPO	Terlaksananya pembangunan UPPO	Jumlah UPPO yang dibangun	Unit	0	0	-	3	30.000.000,00	3	33.000.000,00	3	36.300.000,00	6	39.930.000,00	15	139.230.000,00	Dinas Pertanian
			20	Integrated Participatori Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)	Produktivitas padi sawah di daerah irigasi lokasi proyek	Produktivitas padi di daerah irigasi lokasi proyek	Daerah Irigasi	0	0	-	7	850.000.000,00	7	85.000.000,00	7	850.000.000,00	7	850.000.000,00	28	2.635.000.000,00	Dinas Pertanian
			21	Pendampingan Kegiatan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project	Jumlah Daerah Irigasi Lokasi Proyek IPDMIP	Jumlah Daerah Irigasi Lokasi Proyek IPDMIP	Daerah Irigasi	0	0	-	7	57.000.000,00	7	57.000.000,00	7	57.000.000,00	7	57.000.000,00	28	228.000.000,00	
			22	Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi	Meningkatnya serapan pupuk bersubsidi	Persentase Distribusi Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran	%	85	85	200.000.000,00	90	220.000.000,00	90	242.000.000,00	90	266.200.000,00	90	292.820.000,00	445	1.221.020.000,00	Dinas Pertanian
			23	Pendampingan Kegiatan DAK	Terlaksananya Kegiatan DAK	Persentase Pendampingan Kegiatan DAK	%	0	0	-	0	-	100	200.801.000,00	90	220.881.100,00	90	242.969.210,00	280	664.651.310,00	Dinas Pertanian
			24	Fasilitasi Pembentukan Penangkar Benih Padi	Terbentuknya Penangkar Benih padi	Jumlah Penangkar yang terbentuk	Penangkar	0	0	-	0	-	6	120.000.000,00	6	132.000.000,00	6	145.200.000,00	18	397.200.000,00	Dinas Pertanian
			25	Demplot Adaptasi Varietas Benih Padi Sawah	Meningkatnya pengetahuan PPL	Terjainya Varietas Benih Unggul	Varietas	0	2	95.380.400,00	0	-	0	-	0	-	0	0	2	95.380.400,00	Dinas Pertanian
				Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya Penerapan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase peningkatan penerapan teknologi pertanian	%	2	3	3.329.822.700,00	4	6.800.000.000,00	5	8.920.000.000,00	5	9.812.000.000,00	5	10.793.200.000,00	22	39.655.022.700,00	Dinas Pertanian
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah dan Alat Mesin Pertanian yang bertambah	Unit	0	100	2.000.000.000,00	100	2.200.000.000,00	235	2.420.000.000,00	240	2.662.000.000,00	250	2.928.200.000,00	925	12.210.200.000,00	Dinas Pertanian
			2	Penerapan dan Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian	Beroperasinya Traktor dan Alat Berat	Jumlah Traktor dan Alat Berat yang beroperasi dengan baik	Unit	11	11	1.329.822.700,00	49	4.600.000.000,00	66	6.500.000.000,00	66	7.150.000.000,00	66	7.865.000.000,00	258	27.444.822.700,00	Dinas Pertanian
				Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan	Persentase keikutsertaan dalam event promosi produk - produk pertanian/perkebunan	%	0	55	296.536.000,00	60	200.000.000,00	65	445.000.000,00	70	489.500.000,00	75	630.000.000,00	75	2.061.036.000,00	Dinas Pertanian
			1	Promosi produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya Pemasaran Hasil Pertanian	Jumlah Event promosi produk - produk pertanian/perkebunan yang diikuti	Event	2	2	149.813.000,00	2	200.000.000,00	2	210.000.000,00	2	231.000.000,00	2	230.000.000,00	10	1.020.813.000,00	Dinas Pertanian
			2	Pengembangan Kemitraan Agribisnis Pangan Hortikultura di kawasan sentra produksi hortikultura (Komoditi Cabai dan Tomat mendukung Pasar Lelang)	Meningkatnya Pemasaran Hasil Pertanian	Terbentuknya Pasar Lelang	Kecamatan	0	2	146.723.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	2	146.723.000,00	Dinas Pertanian
			3	Fasilitasi Pembentukan Indikasi Geografis Tanaman Perkebunan	Meningkatnya Jumlah IG Perkebunan	Jumlah Organisasi MPG Perkebunan yang terbentuk	Organisasi	0	0	-	0	-	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	200.000.000,00	3	620.000.000,00	Dinas Pertanian
			4	Pemantauan Harga Harian Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya ketersediaan informasi harga komoditi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Komoditi tanaman pangan dan hortikultura yang terpantau harganya	Komoditi	0	0	-	0	-	20	35.000.000,00	20	38.500.000,00	20	200.000.000,00	60	273.500.000,00	Dinas Pertanian
				Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase peningkatan pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase peningkatan pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	%	20	30,00	30	64,00	1.782.886.000,00	70	8.865.029.017,00	75	9.751.531.918,70	80	10.692.085.110,57	80	31.091.532.076,27	Dinas Pertanian

Meningkatnya Pendapatan Petani

			4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19
		13	Bimtek Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS)	Meningkatnya pengetahuan PPS	Jenis Sarana Informasi yang tersedia	Jenis	0	0	-	0	-	153	-	153	-	153	-	459	-	Dinas Pertanian

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Humbang Hasundutan



Ir. Junter Marbun, MM
Pembina Utama Muda

CASCADING DINAS PERTANIAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Formulasi	Penanggungjawab
1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian	Nilai Evaluasi SAKIP	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	BB	Sekretaris
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan kinerja		
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		
		2. Meningkatnya Produksi Pertanian/Perkebunan	Laju Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Program Pengembangan Data/ Informasi Pertanian	Persentase ketersediaan data/informasi pertanian	Produksi Tahun n - Produksi Tahun (n-1) dibagi dengan Produksi Tahun (n-1) dikali 100%	Kabid TPH, Perkebunan dan Penyuluhan
				Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase peningkatan produksi pertanian/perkebunan		
				Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan penerapan teknologi pertanian		
		3. Meningkatnya Pendapatan Petani	Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase keikutsertaan dalam event promosi produk - produk pertanian/perkebunan	Jumlah harga yang diterima petani - jumlah yang dikeluarkan petani x 100 %	Kabid TPH, Perkebunan dan Penyuluhan
				Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase peningkatan kapasitas penyuluh pertanian		
				Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani		

KEPALA DINAS PERTANIAN

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian
INDIKATOR KINERJA Nilai Evaluasi SAKIP

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Produksi Pertanian/Perkebunan
INDIKATOR KINERJA Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Pendapatan Petani
INDIKATOR KINERJA Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)

SEKRETARIAT
PROGRAM
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian 3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Pengembangan Data/Informasi
SASARAN PROGRAM
1 Meningkatkan kualitas pelayanan internal 2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 3 Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur 4 Meningkatkan kualitas laporan kinerja dan keuangan 5 Meningkatkan ketersediaan data/informasi pertanian
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1 Angka Indeks Kepuasan Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi 3 Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur 4 Persentase peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan kinerja 5 Persentase ketersediaan data/informasi pertanian

BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROGRAM
1.Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan 2. Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan 3 Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Pertanian
SASARAN PROGRAM
1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Meningkatnya Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan 3. Meningkatnya Mutu Sumber Daya Manusia Pertanian
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1 Persentase Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2 Persentase keikutsertaan dalam event promosi produk- produk pertanian/perkebunan 3 Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani

BIDANG PERKEBUNAN
PROGRAM
1. Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan 2. Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan 3. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Pertanian
SASARAN PROGRAM
1 Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan 2 Meningkatnya Pemasaran Hasil Perkebunan 3 Mengaknya Mutu Sumber Daya Manusia Pertanian
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1 Persentase Peningkatan Produksi Pertanian/perkebuan 2 Persentase keikutsertaan dalam event promosi produk- produk pertanian/perkebunan 3 Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani

BIDANG PENYULUHAN, SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN
PROGRAM
1 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 3 Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Pertanian 4 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
SASARAN PROGRAM
1 Meningkatnya Produksi Pertanian/Perkebunan 2 Meningkatnya Kapasitas Penyuluh Pertanian Lapangan 3 Meningkatnya Mutu SDM Pertanian 4 Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1 Persentase Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan 2 Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian 3 Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani 4 Persentase Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KEGIATAN
1 Penyediaan Jasa Surat - Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 8 Penyediaan Makanan dan Minuman 9 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 10 Penyediaan Jasa Non PNS 11 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 18 Pengadaan Alat Angku Alsintan 19 Pengiriman ASN Mengikuti Diklat, Workshop, Bimtek dan Studi Banding
SASARAN KEGIATAN
1 Meningkatnya pelayanan jasa surat - menyurat 2 Meningkatnya ketersediaan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Meningkatnya kebersihan kantor

SEKSI PRODUKSI TPH
KEGIATAN
1 Pengembangan Tanaman Pangan 2 Pengembangan Tanaman Hortikultura 3 Pendampingan UPSUS Pajale 4 Pendampingan Kegiatan Pembangunan UPPO
SASARAN KEGIATAN
1 Meningkatnya produksi tanaman pangan 2 Meningkatnya produksi tanaman hortikultura 3 Terlaksananya Kegiatan UPSUS Pajale 4 Terlaksananya pembangunan UPPO

SEKSI PRODUKSI PERKEBUNAN
KEGIATAN
1 Pengembangan Tanaman Perkebunan 2 Intensifikasi Tanaman Tembakau 3 Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Tembakau kepada Petani
SASARAN KEGIATAN
1 Meningkatnya luas areal tanaman perkebunan 2 Meningkatnya Produktivitas Tanaman Tembakau 3 Meningkatnya Mutu SDM Petani Tembakau

Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Pertanian
KEGIATAN
1 Demplot Komoditi Unggulan 2 Bimtek Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) 3 Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) 4 Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi 5 Jambore Penyuluhan
SASARAN KEGIATAN
1 Meningkatnya pengetahuan PPL 2 Meningkatnya pengetahuan PPS 3 Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian lapangan 4 Meningkatnya serapan pupuk bersubsidi

- 4 Meningkatnya ketersediaan alat tulis kantor
- 5 Meningkatnya ketersediaan cetakan dan penggandaan
- 6 Meningkatnya ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan
- 7 Meningkatnya ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 8 Meningkatnya ketersediaan makanan dan minuman
- 9 Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 10 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- 11 Meningkatnya kualitas laporan keuangan
- 12 Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dalam daerah
- 13 Meningkatnya ketersediaan perlengkapan gedung kantor
- 14 Meningkatnya pelayanan aparatur
- 15 Kendaraan Dinas/Operasional layak pakai
- 16 Terlaksananya pemeliharaan inventaris kantor
- 17 Gedung Kantor terpeliharaan dengan baik
- 18 Meningkatnya Kinerja Alat Berat
- 19 Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- 1 Jumlah jenis jasa pelayanan jasa surat - menyurat yang terpenuhi
- 2 Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi
- 3 Jumlah peralatan dan bahan bersih kantor yang terpenuhi
- 4 Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi
- 5 Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi
- 6 Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
- 7 Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi
- 8 Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi
- 9 Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpenuhi
- 10 Jumlah Pegawai Non PNS
- 11 Jumlah jasa administrasi yang terpenuhi
- 12 Jumlah rapat - rapat koordinasi ke dalam daerah yang terpenuhi
- 13 Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang bertambah
- 14 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang bertambah
- 15 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
- 16 Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 17 Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara
- 18 Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat, workshop, bimtek dan studi banding

KASUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI

KEGIATAN

- 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan SKPD
- 2 Penyusunan Statistik Pertanian
- 3 Penyusunan Diagram Timbang NTP (Nilai Tukar Petani) Kabupaten Humbang Hasundutan
- 4 Pengubinan Padi dan Palawija
- 5 Pencacahan Curah Hujan Harian/Iklim
- 6 Penyusunan Data Base Pertanian
- 7 Penyusunan Statistik Perkebunan

SASARAN KEGIATAN

- 1 Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan Tersedianya Data Statistik Pertanian/Perkebunan
- 2 Terukurnya Indeks Nilai Tukar Petani
- 3 Terukurnya Produktivitas Padi dan Palawija
- 4 Tercahainya Curah Hujan Harian/Iklim
- 5 Tersedianya Data Base Pertanian
- 6 Tersedianya Data Statistik Perkebunan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- 1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu
- 2 Data Statistik Pertanian yang valid
- 3 Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yang valid
- 4 Data Produktivitas Tanaman Pangan yang terukur
- 5 Data Curah Hujan Harian/Iklim yang terukur
- 6 Jumlah Data Base Pertanian yang tersusun
- 7 Data Statistik Perkebunan yang valid

KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- 1 Luas tambah tanam (LTT) tanaman pangan
- 2 Luas Tambah Tanam (LTT) Tanaman Hortikultura
- 3 Luas tambah tanam (LTT) Pajale
- 4 Jumlah UPPO yang dibangun

SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN

KEGIATAN

- 1 Pengendalian Hama Terpadu
- 2 Pengadaan Pesticida Pertanian
- 3 Fasilitasi Pembentukan Penangkar Benih Padi
- 4 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Pangan

SASARAN KEGIATAN

- 1 Menurunya serangan hama dan penyakit tanaman
- 2 Terkendalikannya serangan hama dan penyakit tanaman
- 3 Terbentuknya Penangkar Benih padi
- 4 Meningkatnya Pengetahuan Petani

INDIKATOR KINERJA

- 1 Luas lahan yang terkendali hama terpadu
- 2 Jenis pestisida yang tersedia
- 3 Jumlah penangkar benih padi yang terbentuk
- 4 Jumlah Peserta SLPHT Tanaman pangan

SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASAKAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- 1 Pertambahan luas areal tanaman perkebunan
- 2 Produktivitas tanaman tembakau
- 3 Jumlah Petani tembakau yang mengikuti pelatihan

SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

KEGIATAN

- 1 Pembentukan Kebun Benih Sumber Kopi
- 2 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tanaman Perkebunan

SASARAN KEGIATAN

- 1 Meningkatnya ketersediaan bibit kopi bersertifikat
- 2 Meningkatnya Pengetahuan Petani

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- 1 Jumlah kebun benih sumber/penangkar kopi yang terbentuk
- 2 Jumlah Peserta SLPHT Tanaman Perkebunan

SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASAKAN

- 5 Meningkatnya Kapasitas SDM PPL

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- 1 Jumlah demplot Komoditi unggulan
- 2 Jumlah PPS yang mengikuti bimbingan teknis
- 3 Jumlah PPL yang menerima BOP
- 4 Persentase distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran
- 5 Jumlah PPL yang mengikuti jambore

SEKSI METODE DAN INFORMASI PENYULUH PERTANIAN

KEGIATAN

- 1 Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)
- 2 Pendampingan Kegiatan IPDMIP
- 3 Penilaian Kelas Kelompok Tani
- 4 Rapat Posko Pertanian
- 5 Rembuk Tani
- 6 Fasilitasi Kelembagaan Petani
- 7 Penyediaan Sarana Informasi Penyuluhan
- 8 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian

SASARAN KEGIATAN

- 1 Meningkatnya produktivitas padi di lokasi IPDMIP
- 2 Terlaksananya kegiatan IPDMIP
- 3 Meningkatnya Kelas Kelompok Tani
- 4 Pelaksanaan program yang tepat sasaran
- 5 Meningkatnya sinergitas pembangunan pertanian antara pemerintah dan stake holder
- 6 Meningkatnya pembinaan kelembagaan petani
- 7 Meningkatnya ketersediaan informasi penyuluh
- 8 Meningkatnya Monitoring Kegiatan Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- 1 Produktivitas padi sawah di daerah irigasi lokasi proyek
- 2 Jumlah Daerah Irigasi Lokasi Proyek IPDMIP
- 3 Persentase Kelompok Tani yang naik kelas
- 4 Persentase Pos Simpul dan Koordinasi
- 5 Jumlah rembuk tani dalam setahun
- 6 Jumlah Kelembagaan Petani yang difasilitasi
- 7 Jenis sarana informasi penyuluh yang tersedia
- 8 Persentase Kegiatan Penyuluhan yang dimonitoring

SEKSI PRASARANA DAN SARANA

REKORD KEGIATAN DAN HASIL
KEGIATAN
-
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
-

REKORD KEGIATAN DAN HASIL
KEGIATAN
<ol style="list-style-type: none"> Promosi Produksi Pertanian/Perkebunan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemantau Harga Harian Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura
SASARAN KEGIATAN
<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Promosi Produksi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya monitoring kegiatan TPH Meningkatnya ketersediaan informasi harga komoditi tanaman pangan dan hortikultura
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
<ol style="list-style-type: none"> Jumlah event promosi produk - produk pertanian/perkebunan yang diikuti Persentase kegiatan bidang tanaman pangan dan hortikultura yang dimonitoring Jumlah komoditi tanaman pangan dan hortikultura yang terpantau harganya

REKORD KEGIATAN DAN HASIL
KEGIATAN
<ol style="list-style-type: none"> Fasilitasi Pembentukan Indikasi Geografis Tanaman Perkebunan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Pelatihan Peningkatan Mutu Kopi bagi Kelembagaan Kopi Fasilitasi Lembaga Ekonomi Masyarakat
SASARAN KEGIATAN
<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Jumlah IG Perkebunan Meningkatnya Monitoring Kegiatan TPH Meningkatnya Mutu Kopi yang dihasilkan oleh Kelembagaan Kopi Terbentuknya LEM
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Organisasi MPIG Perkebunan yang terbentuk Persentase Kegiatan Bidang Perkebunan yang dimonitoring Jumlah Petani Kopi yang mengikuti pelatihan Jumlah LEM yang difasilitasi

REKORD KEGIATAN DAN HASIL
KEGIATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Pembangunan Embung Pembangunan Dam Parit Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Pembangunan Irigasi Air Tanah Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pembangunan Jalan Produksi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Penerapan dan Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan BPP Pengadaan Sarana dan Prasarana BPP Pendampingan Kegiatan DAK
SASARAN KEGIATAN
<ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pembangunan Jalan Usaha Tani Terlaksananya Pembangunan Embung Terlaksananya Pembangunan Dam Parit Terlaksananya Pembangunan BPP Terlaksananya Pembangunan Irigasi Air Tanah Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Terlaksananya Pembangunan Jalan Produksi Tersedianya DED dan SID Kegiatan Pembangunan Fisik Beroperasinya Traktor dan Alat Berat Tersedianya tanah untuk Pembangunan BPP Tersedianya Sarana dan Prasarana BPP Terlaksananya Kegiatan DAK
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
<ol style="list-style-type: none"> Panjang JUT yang dibangun Jumlah Embung yang dibangun Jumlah Dam Parit yang dibangun Jumlah BPP baru yang dibangun Jumlah Irigasi Air Tanah yang dibangun Jumlah alat dan mesin pertanian yang bertambah Panjang Jalan Produksi yang dibangun Jumlah Data DED dan SID yang tersedianya Jumlah traktor dan alat berat yang beroperasi dengan baik Jumlah lokasi yang tersedia untuk pembangunan BPP Jumlah sarana dan prasarana yang bertambah Persentase pendampingan DAK